

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Adisa Indira Mandigani. “Analisis Hukum Terhadap Akta Jual Beli Tanah Yang Tidak Didaftarkan Ke Badan Pertanahan Nasional.” *OFFICIUM NOTARIUM* 4, no. 1 (2025): 202–222.
- Adrian Sutedi. *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- . *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Ahmad Nashirudin. “Kepastian Hukum Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Tanpa AJB.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48:2 (2018).
- Amalia, Fanisyah Winda, Idfi Setyaningrum, and Mintarti Ariani. “Behavior Economy : Penggunaan Google Review Untuk Mengetahui Tingkat Kepuasan Konsumen (Studi Kasus: Perusahaan X).” *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 7, no. 1 (2025).
- Ardiansyah. *Kebijakan Hukum Pertanahan*. Yogyakarta: Deepublish publiisher, 2022.
- Ayu Larasati, Raffles. “Peralihan Hak Atas Tanah Dengan Perjanjian Jual Beli Menurut Hukum Pertanahan Indonesia.” *Zaaken Journal of Civil and Bussiness Law* 1 (2020): 127–144.
- Baiq Henni Paramita Rosandi. “Akibat Hukum Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Belum Di Daftarkan The Legal Impacts Of Purchasing Unregistered Land Rights.” *Jurnal IUS* 4 no 3, no. 424–435 (2016).
- Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi Dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2008.
- C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

- Christiana Sri Murni. “Peralihan Hak Atas Tanah Tanpa Sertifikat.” *Lex Librum* 4, no. 2 (2018): 680–692.
- Conny R. Semiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Books Grasindo, 2010.
- Edgar Brige Tatulus. “Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Pembatalan Jual Beli Tanah Karena Tidak Terlaksananya Suatu Proses Peralihan Hak Atas Tanah.” *Lex Privatum* VI, no. 10 (2018): 22–31.
- Fariska Manggara. “Pembatalan Jual Beli Tanah Karena Tidak Terlaksananya Proses Peralihan Hak Atas Tanah.” *Lex Administratum* 1, no. 1 (2023).
- Febrian, Oktar Hasudungan, Diana Ria Winanti Napitupulu. “Jual Beli: Bagaimana Jika Transaksi Jual Beli Atas Tanah Tidak Dilakukan Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).” *Jurnal Sosial dan Sains (SOSAINS)* 5, no. 4 (2025): 167–186.
- Febrian, M Ibnu, Yuniar Rahmatiar, Muhamad Abas, and Suyono Sanjaya. “Peralihan Hak Atas Tanah Tanpa Adanya Akta Jual Beli (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 11 / Pdt . G / 2024 / Pn Mjl).” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik (JIHHP)*, 5, no. 6 (2025).
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Handayani, Aroffa Mohammad Ryar MirzadSri Wahyu. “Legalitas Akta Jual Beli (AJB) Sebagai Bukti Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Kepastian Dan Perlindungan Hukum.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3 Nomor 5 (2025): 6940–6949.
- Hasanah. “Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial).” *Jurnal UIN walisongo* 8:1 (2016): 90.
- Hendryan Thendean. “Keabsahan jual beli tanah yang dilakukan tanpa akta pejabat pembuat akta tanah menurut Pasal 1457 KUHPERDATA.” *Lex Privatum* 11, no. 1 (2017): 92–105.
- Herlien Budiono. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Imelda, Markoni, Joko Widarto, Zulfikar. “Kekuatan Hukum Akta Notaris Dan Ppat Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Belum Terdaftar Pada Akta Jual Beli

- Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli.” *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora (ASH)* 2, no. 2 (2025).
- Isnaini, Anggreni A. Lubis. *Hukum Agraria : Kajian Komprehensif*. Medan: Pustaka Prima, 2022.
- Mahmudah, Livia Lailatul. “Jual Beli Tanah Tanpa Akta Jual Beli Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Perspektif Hukum Islam,” 2023.
- Miftahul Khair Patahuddin, Harly Stanly Muaja, Doortje Durin Turangan. “Pengaturan Terhadap Peralihan Hak Milik Atas Tanah Melalui Jual Beli Tanah Menurut UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.” *jurnal Correspondencias & Análisis* 13, no. 5 (2023).
- Muhammad Syahrums. “*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal,*” *Laporan Skripsi Dan Tesis*,. Riau: DOTPLUS Publisher, 2022.
- Napitupulu, Diana R W. *Hukum Agraria*. Jakarta: UKI Press, 2023.
- Nuraeni, Syifa Dewi. ““Analisis Efektivitas Promosi Melalui Media Sosial Instagram Pada PT. Niion Indonesia Utama Pada Tahun 2017,.”” *Jurnal e-Proceeding of Applied Science* 3:2 (2017).
- Palenewen, James Yoseph, Daniel Tanati, and Marthinus Solossa. “Keabsahan Jual Beli Tanah Tanpa Melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah Di Kota Jayapura” 2, no. November (2024): 175–183.
- R. Subekti. *Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Terjemahan Oleh R. Subekti*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1974.
- Rijali, Ahmad. ““Analisis Data Kualitatif.”” *Jurnal UIN Antasari* 17:33 (2018): 12.
- Rizqian, Irvan. ““Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia.”” *Journal Justiciabellen* 1:1 (21AD).
- RR. Lyia Aina Prihardiati. “Teori Hukum Pembangunan Antara Das Sollen.” *Hermeneutika* 5, no. 1 (2021).
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria; Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2012.
- . “Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah.” Jakarta: Kencana

- Prenadamedia Group, 2010.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Sigit Sapto Nugroho, Muhammad TohariMudji Rahardjo. *Hukum Agraria Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam, 2017.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia, 2005.
- Sudargo Gautama. *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung: Penerbit Alumni, 1973.
- “Ayi,” n.d.
- “Badan Pertanahan Nasional. (2025). Laporan Tahunan Sengketa Tanah. Jakarta: BPN.” (n.d.).
- “Jahro,” n.d.
- “Notaris Dwi Teguh Winarti,” n.d.
- Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.*, n.d.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 37 Ayat (1).*, n.d.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18, 2021.*
- Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, n.d.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).*, n.d.